

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan penggunaan jasa Akuntan Publik menyebabkan Akuntan Publik kini sebagai salah satu profesi yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan dunia usaha perdagangan barang dan jasa atas penerimaan informasi yang berkualitas bagi konsumen dalam mengambil keputusan. Melalui peningkatan yang terjadi seluruh perusahaan akuntan publik diharapkan juga mampu meningkatkan kinerja dari segi kualitas dan kuantitas melalui kebijakan dan prosedur agar mampu bersaing dengan perusahaan akuntan publik lainnya dalam memenuhi permintaan tinggi dari entitas untuk di audit.

Peningkatan tersebut dimulai dari peran akuntan publik atau auditor dalam memberikan jasa asurans, menyatakan bahwa melalui pemeriksaannya, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan memberikan publik keyakinan yang memadai terhadap hasil pekerjaannya. Upaya peningkatan tidak hanya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, Menteri Keuangan melalui peraturan dan juga UU yang berlaku ikut meningkatkan profesionalisme kerja audit dalam standar dan sistem yang mengatur pengendalian mutu audit.

Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki dan melampirkan rancangan sistem pengendalian mutu (RSPM) KAP yang telah memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. KAP atau cabang KAP harus menjalankan sistem pengendalian mutu tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Standar Pengendalian Mutu (SPM) yang dikeluarkan oleh IAPI terbaru No. 1 (satu) tahun 2013 memuat 6 unsur yaitu tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, dan pemantauan.

Kualitas audit itu sendiri tidak hanya dilihat dari sistem pengendalian mutu yang telah dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik melainkan dilihat juga dari cara pengaplikasian sistem pengendalian mutu tersebut. Salah satu hal yang membuktikan bahwa sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik sudah dijalankan adalah dilihat dari keefektifan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja yang digunakan pada masa kini tidak lagi menggunakan kertas, Hampir seluruh KAP di Indonesia sudah menggunakan kertas kerja dalam bentuk *soft file*, baik yang masih diisi/diketik secara manual maupun sudah terisi secara otomatis menggunakan sistem. Adapun program yang diperintahkan terhadap *soft file* kertas kerja tersebut dinamakan program audit. Melalui program audit yang dikerjakan pada kertas kerja, seluruh sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik dapat terlihat sudah dijalankan dari mulai perencanaan audit hingga menghasilkan laporan keuangan secara efektif atau tidak.

Salah satu fenomena umum yang menjadi latar belakang penelitian ini terjadi pada 28 Agustus 2018. Menteri Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019 kepada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Atas pengaduan tersebut, Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) tahun buku 2012 sampai dengan 2016. Sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh Deloitte Indonesia mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior

(manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. (www.pppk.kemenkeu.go.id, 2018).

Oleh karena itu, tidak hanya penerapan tetapi pengevaluasian sistem pengendalian mutu juga perlu dilakukan agar dapat dipastikan semua standar, kebijakan dan sistem yang diterapkan berjalan dengan baik. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik berhasil menjalani perannya pada masa kini dalam menciptakan perekonomian sehat, efektif dan keterbukaan informasi dalam bidang keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk malakukan evaluasi sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik khususnya pada KAP ini karena sudah memiliki Sistem Pengendalian Mutu. Penelitian ini diberi judul, "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Pada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia)".



1.2 Fokus Penelitian

- a) Mengingat sangat luasnya ruang lingkup pembahasan mengenai evaluasi sistem pengendalian mutu, maka masalah dalam skripsi ini akan dibatasi pada kepatuhan terhadap Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 tahun 2013 oleh IAPI dan keefektifan penyusunan kertas kerja Pemeriksaan.
- b) Penelitian ini terbatas pada objek penelitian KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) yang selanjutnya disingkat menjadi KAP KNMTR.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah :

- a) Apakah KAP KNMTR telah melaksanakan dan memenuhi Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh IAPI?
- b) Bagaimana keefektifan penyusunan kertas kerja audit pada KAP KNMTR berdasarkan Sistem Pengendalian Mutu.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui apakah KAP KNMTR telah melaksanakan dan memenuhi Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh IAPI.
- b) Untuk mengetahui bagaimana keefektifan penyusunan kertas kerja audit pada KAP KNMTR berdasarkan Sistem Pengendalian Mutu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual menjadi referensi bagi peneliti berikutnya sebagai data pendukung studi kasus pada sistem pengendalian mutu akuntan publik.

b) Manfaat Praktis

Sebagai informasi bagi:

- 1) Kantor Akuntan Publik dan auditor, untuk memahami sistem pengendalian mutu dan menerapkannya sesuai dengan SPAP yang berlaku.
- 2) Pengguna jasa Kantor Akuntan Publik, untuk memberikan informasi penerapan SPM KAP.
- 3) Regulator, dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan KAP KNMTR terhadap penerapan sistem pengendalian mutu.

